

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Juli 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1900 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 78.547.716**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 662.897.716**III. HUTANG** Rp. 125.053.997**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 537.843.719

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **1 Oktober 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1900 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 109.755.813**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 694.105.813**III. HUTANG** Rp. 117.599.437**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 576.506.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1934 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1895 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.850.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 87.335.927**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 970.185.927

III. HUTANG Rp. 246.561.543



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

723.624.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1934 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 1895 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.070.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 95.868.432**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 981.438.432

III. HUTANG Rp. 231.803.445**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 749.634.987



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah Seluas 1934 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
4. Tanah Seluas 1895 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.900.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.490.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 128.949.300**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.037.339.300

III. HUTANG Rp. 215.296.723**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 822.042.577



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.098.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/36 m² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah Seluas 1168 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 1934 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 308.000.000
4. Tanah Seluas 1895 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 2434 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 24.850.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.011.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 194.238.376**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.333.099.376



III. HUTANG

Rp. 196.834.186

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.136.265.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PEKIK ANGGORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 437792

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.876.000.000**

1. Tanah Seluas 1168 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. Tanah Seluas 1934 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 309.000.000
3. Tanah Seluas 1895 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2434 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 205.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 22.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 14.450.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 37.508.643****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.950.358.643**



III. HUTANG

Rp. 326.685.661

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.623.672.982

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.